

PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), yaitu :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

- Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
 Tempat : Gedung BRI I Lantai 21
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210
 Waktu : 14.41 WIB s.d 17.10 WIB
 Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2018.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
 3. Penetapan Remunerasi/Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 serta Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019.
 5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat

Direksi Perseroan*		Dewan Komisaris Perseroan**	
Direktur Utama	: Suprajarto	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Andrinof A. Chaniago
Wakil Direktur Utama	: Sunarso***	Wakil Komisaris Utama/Komisaris	: -
Direktur Manajemen Risiko	: Mohammad Irfan	Komisaris	: Hadiyanto
Direktur <i>Human Capital</i>	: R. Sophia Alizsa	Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi H
Direktur Keuangan	: Haru Koesmahargyo	Komisaris Independen	: A. Fuad Rahmany
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Sis Apik Wijayanto	Komisaris Independen	: A.Sonny Keraf
Direktur Ritel dan Menengah	: Supari	Komisaris Independen	: Mahmud
Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi	: Indra Utoyo	Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim

Direktur Mikro dan Kecil : Priyastomo
 Direktur Jaringan dan Layanan : Osbal Saragi R.
 Direktur Kepatuhan : Ahmad Solichin Lutfiyanto
 Direktur Konsumer : Handayani

Keterangan:

*)Dari 12 (dua belas) orang Anggota Direktur, seluruh Anggota Direksi hadir pada Rapat Perseroan.

**)Dari 8 (delapan) orang Anggota Dewan Komisaris, terdapat 1 (satu) orang Komisaris yang tidak hadir sehingga jumlah Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat Perseroan sebanyak 7 (tujuh) orang dikarenakan Ybs. Telah diangkat sebagai Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) pada tanggal 29 April 2019.

***) Ybs. Efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test)

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 105.143.889.557 saham setara dengan 86,02% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Fathiah Helmi, SH serta PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek) dalam melakukan penghitungan dan/atau validasi suara.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara Dalam Rapat.

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/Pendapat
Kesatu	104.700.714.747 suara atau 99,56% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	21.450.300 suara atau 0,02% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	421.724.530 suara atau 0,40% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3 (tiga) orang
Kedua	104.842.666.312 suara atau 99,71% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	283.166.535 suara atau 0,27% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	18.056.730 suara 0,02% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3 (tiga) orang

Ketiga	96.832.038.745 suara atau 92,09% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.879.430.165 suara atau 5,59% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	2.432.420.667 suara atau 2,31% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Keempat	98.917.841.212 suara atau 94,07% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.741.241.215 suara atau 5,46% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	484.807.150 suara atau 0,46% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1 (satu) orang
Kelima	71.302.557.999 suara atau 67,81% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	29.918.688.037 suara atau 28,45% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	3.922.643.541 suara atau 3,73% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1 (satu) orang

G. Hasil Keputusan Rapat

MATA ACARA RAPAT KESATU

1. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai Laporan Nomor 00035/2.1032/AU.1/07/1008-2/1/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 serta Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi III selama tahun 2018.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai dengan Laporan No. 00452/2.1032/AU.2/10/1008-2/1/III/2019 tanggal 06 Maret 2019.
2. Atas telah disetujui dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dan penawaran umum Obligasi Subordinasi III yang dilaksanakan selama tahun 2018 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2017 sebesar Rp 32.351.133.341.945 (tiga puluh dua triliun – tiga ratus lima puluh satu miliar – seratus tiga puluh tiga juta – tiga ratus empat puluh satu ribu – sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sebagai berikut:

1. Dividen sebesar 50% atau Rp16.175.566.670.973 (enam belas triliun – seratus tujuh puluh lima miliar – lima ratus enam puluh enam juta

- enam ratus tujuh puluh ribu – sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan sekurang- kurangnya 56,75% saham sebesar Rp9.179.798.381.218 (sembilan triliun - seratus tujuh puluh sembilan miliar – tujuh ratus sembilan puluh delapan juta – tiga ratus delapan puluh satu ribu – dua ratus delapan belas – rupiah) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Sebesar 50% atau Rp16.175.566.670.973 (enam belas triliun – seratus tujuh puluh lima miliar – lima ratus enam puluh enam juta – enam ratus tujuh puluh ribu – sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2018, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2018, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2019.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2019 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

1. Meemhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Sdr. Gatot Trihargo - sebagai Wakil Komisaris Utama
 - 2) Sdr. Mahmud - sebagai Komisaris Independenterhitung sejak ditutup RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Sdr. Wahyu Kuncoro - sebagai Wakil Komisaris Utama
 - 2) Sdr. Hendricus Ivo - sebagai Komisaris Independen

3. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Andrinof A. Chaniago
 - 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris : Wahyu Kuncoro
 - 3) Komisaris : Nicolaus Teguh Budi Harjanto
 - 4) Komisaris : Hadiyanto
 - 5) Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim
 - 6) Komisaris Independen : Hendricus Ivo
 - 7) Komisaris Independen : A. Sonny Keraf
 - 8) Komisaris Independen : A. Fuad Rahmany
5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau Pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2018

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“**Perseroan**”) pada tanggal 15 Mei 2019, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai tahun buku 2018 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp16.175.566.670.973 (enam belas triliun – seratus tujuh puluh lima miliar – lima ratus enam puluh enam juta – enam ratus tujuh puluh ribu – Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yaitu **50%** dari laba Perseroan tahun buku 2018 atau sekurang-kurangnya **Rp131,139977** per lembar saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2018 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>cum Dividen</i>): - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	23 Mei 2019 27 Mei 2019
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	24 Mei 2019 28 Mei 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	27 Mei 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen	13 Juni 2019

Tata Cara Pembayaran Dividen

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau recording date pada tanggal 27 Mei dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 27 Mei 2019.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 Juni 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya atau Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT. Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 27 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut yang tidak mencantumkan NPWP, maka akan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 22 Juli 2019.

Jakarta, 16 Mei 2019
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

DIREKSI

